

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
K A T A P E N G A N T A R	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
A. LATAR BELAKANG	5
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	6
C. DASAR HUKUM.....	7
D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN	8
BAB II	17
PERENCANAAN KINERJA.....	17
A. PERENCANAAN STRATEGIS	17
B. PENETAPAN KINERJA.....	24
BAB III	25
AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. CAPAIAN KINERJA	25
B. REALISASI ANGGARAN.....	33
C. LAPORAN REALISASI BARANG	37
D. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 LAKIP	48
E. KENDALA DAN SOLUSI.....	49
BAB IV	52
P E N U T U P.....	52
<i>Lampiran</i>	54

K A T A P E N G A N T A R

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga tahun 2023 merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga dan merupakan upaya untuk melaksanakan peraturan Pemerintah tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Dalam laporan ini kami menyajikan informasi terkait pencapaian program maupun hambatan yang dialami selama tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini dapat terlaksana berkat kerja sama dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sekretaris, Para Kabid dan semua Jajaran struktural dan Koordinator yang ada di Balai Penyuluhan KB oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023 ini. Dan penyusunan LKjIP 2021 ini, sesuai dengan surat Bapak Walikota Sibolga melalui Sekretaris Daerah Kota Sibolga Nomor : 800/ 003 /ORG tanggal 3 Januari 2022.

Kami menyadari bahwa dalam Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga Tahun 2023 masih terdapat kekurangan-kekurangan maupun kelemahan-kelemahan,oleh karena itu kami senantiasa akan menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

Sibolga, Januari 2024
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Kota Sibolga

Richard M. Pangaribuan, S.Si, Apt. M.Kes
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681113 200212 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga adalah Lembaga Teknis Daerah bagian dari Pemerintahan Kota Sibolga. Yang berfungsi melaksanakan urusan pemerintah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui upaya melaksanakan kegiatan dengan cara menggarap akseptor baru dan membina akseptor aktif dalam masyarakat khususnya Pasangan Usia Subur (PUS). Perencanaan Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) merupakan pola pendekatan perencanaan penggarapan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya.

Dalam peraturan dan perundangan yang ada sekarang, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhikaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan, juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan.

Untuk dapat menjalankan proses tersebut di atas, beberapa kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2022 yang didasarkan pada Permendagri Nomor 54 tahun 2010. Rencana kegiatan ini selain sebagai upaya menjalankan tupoksi sesuai dengan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 12 Januari 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Para Pejabat di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga merupakan unsur perencanaan pembangunan daerah dan juga untuk menjalankan capaian-capaian baik program ataupun kegiatan yang ada dalam RPJMD.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan - pelaksanaan kegiatan tersebut di atas maka disusun LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga Tahun 2021. Tuntutan adanya Laporan Kinerja ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan informasi yang diharapkan dari laporan ini yaitu dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap masyarakat, menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak - pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Dari evaluasi kinerja atas keberhasilan dan target strategipencapaian Visi dan Misi Organisasi melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga menurut Indikator Kinerjanya maka capaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

- a.** Terlaksananya pelayanan terhadap akseptor baru, dinyatakan memuaskan dengan nilai capaian 100 %
- b.** Terlaksananya pelayanan pembinaan akseptor aktif, dinyatakan memuaskan dengan nilai capaian 100 %
- c.** Terlaksananya data umpan balik setiap bulannya dinyatakan memuaskan dengan nilai capaian 100 %

Sibolga, Januari 2024
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Kota Sibolga

Richard M. Pangaribuan, S.Si, Apt. M.Kes
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681113 200212 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang dikenal dengan Program Bangga Kencana berdasarkan amanat Undang- Undang Nomor 52 tahun 2009, meliputi berbagai aspek program yaitu program peningkatan ketahanan keluarga balita dan anak, ketahanan remaja dan ketahanan lanjut usia serta pemberdayaan ekonomi keluarga.

Di bidang kependudukan meliputi kegiatan tentang kerjasama pendidikan kependudukan, pemaduan kebijakan pengendalian penduduk, perencanaan pengendalian penduduk serta analisis dampak kependudukan.

Sementara itu dibidang Keluarga Berencana meliputi program dan kegiatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kontrasepsi, penyediaan alat dan obat kontrasepsi yang merata di seluruh wilayah dan fasilitas kesehatan, penggerakan pelayanan keluarga berencana di wilayah kumuh, miskin dan rentan dan berbagai wilayah serta kegiatan di bidang kesehatan reproduksi bagi pasangan usia subur.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, telah ditetapkan visi dan misi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Nasional yaitu "Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan melindungi hak hidup perempuan dan anak. Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya "Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang" dengan sasaran strategis yaitu; 1) menurunkan Angka Kelahiran Total/total *Fertility Rate* (TFR) dapat mencapai 2,50 pada tahun 2021 2) meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/modern *Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) 71,40 persen pada tahun 2021 3) menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/L/mef Need 10,200 persen pada tahun 2021 4) menghindari Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun ,5)

meningkatnya Median Usia Kawin Per-tama (MUKP) perempuan dari 22 tahun pada 2021.

Seperti yang kita ketahui bersama pada awal tahun 2020 pandemi covid-19 mulai menyerang seluruh negeri dibelahan dunia, termasuk di Kota Sibolga. Pandemi tersebut juga berdampak pada program Bangga Kencana sehingga dalam pelaksanaan penggerakan dan pelayanan program harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi wilayah masing-masing. Namun, kondisi tersebut tidak menurunkan semangat para petugas KB dalam mencapai sasaran program Bangga Kencana yang sudah ditetapkan targetnya dalam Prakiraan Permintaan Masyarakat (PPM).

Selanjutnya dari hasil capaian program dan anggaran tersebut, memang ada beberapa yang belum dapat mencapai target. Dengan situasi kondisi pandemi covid-19 yang masih terus terjadi, maka untuk tahun 2023 ini diperlukan strategi dan upaya-upaya yang efektif dan tepat sasaran sehingga program Bangga Kencana dapat berjalan secara sinergi dan berkesinambungan. koordinasi dan kerja sama dengan seluruh pemangku kebijakan/stakeholder dan mitra kerja lainnya.

Strategi pelaksanaan Program Bangga Kencana tahun 2022 harus disusun dan dikembangkan dalam bentuk operasional nyata serta memiliki output yang terukur dengan menyesuaikan kondisi pandemi covid-19.

Langkah-langkah percepatan penyelenggaraan program Bangga Kencana ini harus segera dimulai sejak dini. Terutama untuk menindaklanjuti berbagai isu strategis yang berkembang di masyarakat saat pandemi covid-19 seperti sekarang ini. Isu yang berkembang pada saat ini di masyarakat, dengan kondisi pandemi covid-19, justru meningkatkan angka kehamilan di kalangan pasangan usia subur. Oleh karena itu, tanggung jawab dan kerja sama para pemangku kebijakan dan mitra kerja dalam peningkatan penggerakan Program Bangga Kencana di seluruh tingkatan wilayah.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor : 10 Tahun 2010 Tanggal 12 Januari 2017 tentang “ Pembentukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga “ ,

bahwa kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Sibolga adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

- a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah pelaksana Pemerintah Kota Sibolga.
- b. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Sibolga.

2. Tugas Pokok

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk dan terhadap Instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat serta masyarakat di Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ketatausahaan, organisasi tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

C. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang pemerintahan Daerah

- b. Undang-Undang No 27 Tahun 2003 tentang keuangan Daerah
- c. Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 Yang dijabarkan dalam PP No 38 Tahun 2007 tentang urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota
- d. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2017 tentang struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Sibolga

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Adapun sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga adalah sebagai berikut :

Executive summary (Ikhtisar Eksekutif)

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Kinerja
2. Realisasi Anggaran
3. Analisis Dan Efisiensi dan Efektifitas Kerja
4. Capaian Kinerja Tahun 2020 Lakip
5. Kendala dan Solusi

Bab IV Penutup

Lampiran :

1. Penetapan Kinerja

STRUKTUR ORGANISASI

Tugas, fungsi, dan struktur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga dilaksanakan menurut Peraturan Walikota Sibolga Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Sibolga dengan uraian sebagai berikut ;

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- c. Bidang Keluarga Berencana;
- d. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan; dan
2. Subbagian Program dan Keuangan.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari :

1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana; dan
3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :

1. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;
2. Seksi jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber Keluarga Berencana;

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :

1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; dan
3. Seksi Bina Ketahanan Remaja;

UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

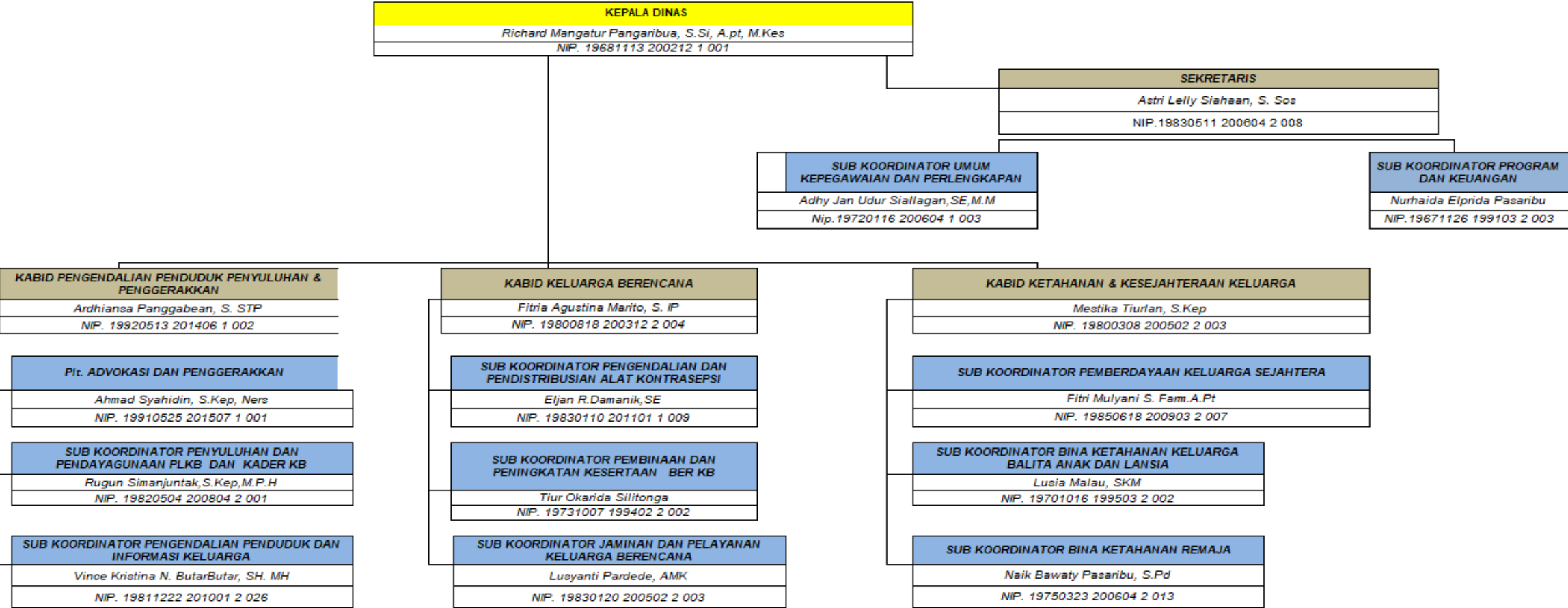
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

STRUKTUR ORGANISASI

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga adalah sesuai dengan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, susunan organisasi serta tugas pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga dibawah ini adalah gambaran struktur organisasi tersebut :

KOTA : SIBOLGA

STRUKTUR JABATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SIBOLGA



Keterangan Warna :
Eselon II
Eselon III
Eselon IV

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SIBOLGA,

RICHARD MANGATUR PANGARIBUAN, S.Si, A.pt, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681113 200212 1 001

- JUMLAH TENAGA

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga didukung oleh tenaga/Pegawai dengan berbagai pendidikan. Tercatat secara keseluruhan jumlah pegawai ASN sejumlah 42 orang yang terdiri dari ASN Daerah sebanyak 27 orang dan ASN Pusat sebanyak 15 Orang untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	: 28 Orang
Pegawai Petugas Keluarga Berencana (PKB) Pusat	: 13 Orang
Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P3K)	: 4 Orang
Tenaga Harian Lepas (THL)	: 55 Orang
Jumlah	: 95 Orang

- JENIS PENDIDIKAN

Tingkat pendidikan pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga sudah cukup baik. Kualifikasi pendidikan pegawai PNS dan THL Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga adalah sebagai berikut :

JENJANG PENDIDIKAN	PNS DAERAH, PNS PUSAT DAN P3K	TENAGA HARIANLEPAS
S-2	8	-
S-1	23	30
D-IV	-	-
D-III	9	10
D-II	1	2
SMA	4	13
JUMLAH	45	55
	100	

PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI 5 (LIMA) TAHUN KE DEPAN

No	Nama Jabatan	Bezetting Pegawai saat ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi									
				Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan				
				2020	2021	2023	2023	2024	2020	2021	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah Seluruhnya	24	35	1	1	2	0	1	19	2	2	0	1
1	Kepala Dinas	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2	Sekretaris	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Ka. subbag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4	Pengelola Kepegawaian	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5	Pengadministrasi Umum	3	2	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0
6	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
7	Pranata Kearsipan	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
8	Pramu Bakti	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
9	Ka. Subbag Program dan Keuangan	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
10	Bendahara	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Verifikator Keuangan	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
12	Pengadministrasi Perencanaan	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

	dan Program												
13	Ka. Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
14	Kasi. Advokasi dan Penggerakan	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15	Penyusun Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
16	Kasi. Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Analisis Penyuluh Keluarga Berencana	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
18	Kasi. Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Pengolah Data Penyuluhan dan Layanan Informasi	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
20	Ka. Bidang Keluarga Berencana	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kasi. Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pengadministrasi Alat dan Obat Kontrasepsi	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
23	Kasi. Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Pemeriksa Pelayanan Keluarga Berencana	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
25	Kasi. Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Analisis Keluarga Berencana	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

27	Ka. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kasi. Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
30	Kasi Bina Ketahanan Keluarga Balita Anak dan Lansia	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Pengelola Pembinaan Ketahanan Keluarga	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
32	Kasi Bina Ketahanan Remaja	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Pengelola Layanan Keluarga Berencana, Bina Keluarga Remaja dan Keluarga Lansia	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Arah kebijakan dan strategis dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana dengan mengadakan penguatan kepada :

1. Penguatan dan pemanduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan Reproduksi yang merata dan berkualitas.
2. Penyediaan sarana dan prasarana dan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai disetiap fasilitas pelayanan KB
3. Meningkatkan pelayanan KB dengan menggunakan MKJP untuk mengurangi risiko Drop-out maupun penggunaan Non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan serta memberikan pelayanan KB lanjutan dengan pertimbangan prinsip Rasional, Efektif, dan Efisien
4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga Lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, untuk mendukung pergerakan dan penyuluhan KB
5. Peningkatan pengetahuan KB dan pembangunan keluarga dalam penggunaan Alat Kontrasepsi
6. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok-kelompok bina keluarga dalam rangka kesertaan ber KB dan memberikan penyuluhan kepada calon akseptor untuk ber KB
7. Penguatan KKB melalui penyediaan data dan informasi

Sesuai dengan arah dan kebijakan pemerintah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diharapkan membantu pemerintah mewujudkan Program Pembangunan melalui Program Keluarga Berencana. Untuk mencapai Misi dapat ditetapkan dengan:

- a. Menggerakkan dan Memberdayakan Seluruh Masyarakat Dalam Program KB

- Setiap Kelurahan memiliki Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) yang berperan aktif sebagai fasilitator KB Kelurahan.
 - Seluruh Kelurahan, mendapatkan pelayanan KB bermutu.
 - Setiap kecamatan memiliki Pusat Informasi dan konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) yang aktif.
- b. Menata Kembali Pengelolaan Program KB
- Menerapkan Pengelolaan Program KB yang terintegrasi outcome yang jelas
 - Menerapkan sistem informasi Up-to-date.
 - Setiap Koordinator Kecamatan diharapkan dapat mencapai sasaran Program KB di setiap wilayahnya
- c. Memperkuat SDM Operasional Program KB
- Seluruh Kecamatan dan Kelurahan memiliki tenaga PLKB/PKB yang terlatih.
 - Setiap Kecamatan/Kelurahan memiliki tenaga pengelola KB.
 - Seluruh petugas KB memenuhi standar kompetensi dengan jumlah yang memadai.
- d. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui Pelayanan KB
- Seluruh Keluarga yang memiliki balita menjadi anggota aktif Bina Keluarga Balita (BKB).
 - Setiap Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I anggota UPPKS memiliki usaha ekonomi produktif.
 - Setiap Kecamatan/Kelurahan memiliki kelompok percontohan Bina Keluarga Remaja (BKR).
 - Setiap Kecamatan/Kelurahan memiliki kelompok percontohan Bina Lingkungan Keluarga (BLK).

Untuk mewujudkan ini Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana menetapkan empat tujuan strategis yang diuraikan dalam sasaran Strategis sebagai berikut :

Tujuan Strategis I:

Penguatan tata kelola dan pengembangan bidang keluarga Berencana menjadi salah satu tujuan strategis dalam rangka memperkuat implementasi Program KB, diperlukan data-data informasi yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk mencapai tujuan ini ditetapkan sasaran strategis yaitu :

- ***Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)***

Laju Pertumbuhan Penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Masyarakat yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin kecil.

Tujuan Strategis II:

Meningkatkan akses pelayanan KB yang merata dan berkualitas.

Salah satu syarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Berkualitas dan berdaya saing dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui Keluarga Berencana.

Untuk mencapai tujuan ini ditetapkan sasaran strategis yaitu :

- ***Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-19 tahun)***

Angka kelahiran merupakan komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat merubah jumlah penduduk. Melalui sasaran ini Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana membuat kegiatan-kegiatan strategis yang fokus pada pengendalian jumlah penduduk.

- ***Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi***

Salah satu upaya untuk menurunkan Angka kelahiran adalah meningkatkan pemakaian kontrasepsi bagi pasangan usia subur

Tujuan Strategis III:

Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non MKJP.

Penggunaan Kontrasepsi di tawarkan kepada masyarakat. Metoda kontrasepsi dapat dibagi dua yaitu metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan metode jangka pendek (non MKJP).ditetaptan sasaran strategis yaitu :

- ***Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet Need)***

Kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi didefinisikan sebagai persentase wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarakan kelahiran berikutnya tetapi tidak memakai alat kontrasepsi. Melalui sasaran ini Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana bertekad menurunkan angka unmet need.

- ***Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-19 tahun)***

Keluarga Berencana memiliki peran dalam menurunkan risiko kematian ibu melalui upaya pencegahan kehamilan, penundaan usia kehamilan serta menjarakan kehamilan. Melalui sasaran strategis ini Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana berupaya menurunkan kehamilan yang tidak diinginkan WUS melalui Advokasi dan KIE.

Tujuan Strategis IV :

- **Meningkatkan pemahaman remaja mengenai KB dan Kesehatan reproduksi**

Program kependudukan, Keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga tidak hanya bertanggung jawab atas pengendalian penduduk namun juga berupaya meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan yang merupakan syarat utamadalam memperbaiki derajat kesehatan masyarakat.

Melalui tujuan startegis ini Dinas pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan sasaran strategis yaitu :

- **Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia (15-19 tahn) (ASFR 15-19 tahun)**

Fertilitas remaja merupakan isu penting dari segi kesehatan dan sosial karena berhubungan dengan tingkat kesakitan serta kematian ibu dan anak. Remaja yang berusia 18 tahun lebih berpeluang untuk mengalami masalah pada bayinya dan bahkan bisa mengakibatkan kematian. Selain itu melahirkan pada usia muda mengurangi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mendapat pekerjaan. Melalui sasaran strategis ini Dinas Pengendalian Penduduk dankeluarga Berencana berupaya melakukan berbagai kegiatan terutama penyuluhan yang dilakukan di sekolah tingkat SLTP,SLTA, dan Perguruan Tinggi

Kebijakan :

1. Meningkatnya Perencanaan Kehamilan dan Mencegah Kehamilan yang belum diinginkan.

Kebijakan ini dicapai dengan sasaran :

- a. Agar seluruh kehamilan adalah diinginkan
 - b. Pengaturan jarak dan usia melahirkan
 - c. Peningkatan pemakaian alat kontrasepsi yang efektif dan efisien
 - d. Penurunan tingkat kegagalan pemakaian alat kontrasepsi
 - e. Penurunan efek samping, komplikasi dan meningkatkan kepuasan pemakaian alat kontrasepsi.
 - f. Peningkatan penggunaan IUD, Vasektomi dan Tubektomi
 - g. Perlindungan terhadap pemakai alat kontrasepsi peserta KB
 - h. Pelayanan gratis bagi peserta KB Pra Sejahtera dan KS 1
 - i. Penurunan kehamilan dikalangan penduduk usia remaja
 - j. Peningkatan keikutsertaan pria dalam ber-KB
 - k. Promosi, perlindungan dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi
2. Meningkatkan status kesehatan perempuan dan anak.

Kegiatan ini dicapai dengan sasaran :

- a. Pengaturan usia melahirkan yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua
- b. Pengaturan jarak kehamilan/kelahiran
- c. Peningkatan keterlibatan pria dalam kehamilan dan perawatan anak
- d. Peningkatan pemberian ASI eksklusif
- e. Pencegahan kehamilan dan perlindungan infeksi menular seksual dan HIV/AIDS
- f. Pendidikan pencegahan kehamilan

- g. Pencegahan masalah pada saat kehamilan (misalnya pencegahan infertilisasi serta aborsi yang tidak sehat)

3. Meningkatkan kesehatan dan kepuasan seksual

Kebijakan ini dicapai dengan sasaran :

- a. Peningkatan pemakai dan kualitas alat kontrasepsi
- b. Penurunan kegagalan penggunaan alat kontrasepsi
- c. Penurunan efek samping dan komplikasi
- d. Peningkatan pemakaian alat kontrasepsi bagi pria
- e. Pencegahan dan perlindungan infeksi menular seksual dan HIV/AIDS
- f. Pendidikan seks dalam hal kontrasepsi dan seksualitas.
- g. Pencegahan masalah pada saat kehamilan (misalnya pencegahan infertilisasi serta aborsi yang tidak sehat)

4. Meningkatkan akses dan kualitas informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja, termasuk pencegahan HIV/AIDS dan narkoba.

Kebijakan ini dicapai dengan sasaran :

- a. Meningkatnya pengetahuan sikap dan perilaku remaja terhadap kesehatan reproduksi
- b. Meningkatnya pemanfaatan saran informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja (KRR)
- c. Meningkatnya ketersediaan materi KRR yang berkualitas
- d. Meningkatnya ketersediaan tenaga dan fasilitas program KRR
- e. Meningkatnya kesertaan masyarakat seperti LSOM, keluarga, instansi pemerintah terkait dalam program KRR

5. Meningkatkan kelembagaan dan jejaring pelayanan KB
Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan mobilisasi sumber daya dan peran serta masyarakat

6. Mengembangkan dan memantapkan ketahanan keluarga.

7. Mengembangkan dan memantapkan pemberdayaan keluarga

8. Penguatan kualitas pengelolaan data informasi.

9. Pelatihan bagi pelatihan (TOT) SDM Pelayanan dan pendamping korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berikut ini adalah tabel indikator kinerja sasaran strategis pada tahun 2023

1. Terwujudnya capaian peserta KB baru secara transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Tercapainya peserta KB baru sesuai dengan prakiraan permintaan masyarakat	- Jumlah data-data capaian akseptor baru
	- Jumlah data-data capaian akseptor baru per Kecamatan

2. Meningkatnya peserta KB aktif yang efisien dan efektif pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatkan peserta KB aktif sesuai dengan prakiraan permintaan masyarakat	- Jumlah data-data capaian akseptor aktif dengan penggunaan alkon per-mix kontrasepsi.
	- Jumlah data-data capaian akseptor aktif per Kecamatan per mix-kontrasepsi

3. Terselenggaranya perencanaan umum dan perencanaan tahunan daerah sesuai dengan rencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Tertatanya data potensial unggulan yang baik dan sesuai dengan klasifikasi.	- Tersedianya data capaian setiap bulannya sesuai dengan klasifikasi. Jumlah dokumen hasil capaian yang tersedia - - Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga dimulai dengan pengembangan indikator kinerja dan metode pengukuran yang berpedoman pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Kota Sibolga. Pengukuran kinerja ditekankan pada penetapan target sasaran tahunan dan pencapaiannya, dengan cara mengembangkan pengukuran terhadap indikator kinerja output yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kinerja organisasi, di mana hasil pengukuran kinerja organisasi dimaksud lebih lanjut untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja, memberikan solusi pemecahan masalah, dan bahan penyempurnaan pilihan-pilihan dan kebijakan strategis tahun berikutnya.

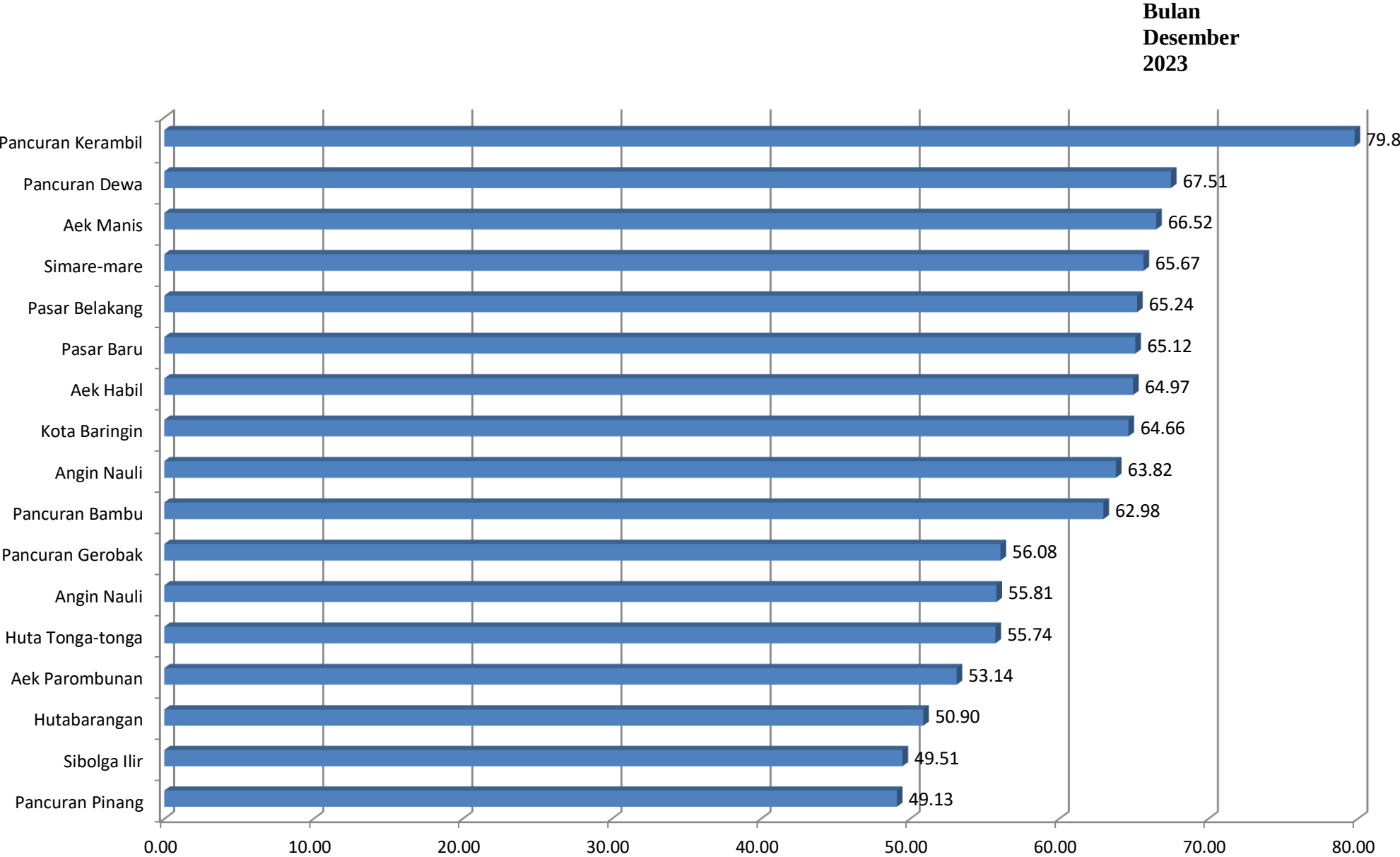
A. CAPAIAN KINERJA

Sesuai dengan perjanjian Kinerja Tahun 2023, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Hasil kinerja tersebut dapat dilihat dari hasil pencapaian yang diperoleh dari lapangan.

Berikut ini adalah gambaran sasaran (target) Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif sesuai dengan permintaan masyarakat yang harus menjadi peserta KB. Tabel kami sajikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 untuk mengetahui perbandingan capaian kinerja. Adapun hasil yang diperoleh adalah Pencapaian peserta KB Baru menurun sebanyak 8,56 persen dan pencapaian KB aktif menurun sebanyak 6,3 persen penurunan ini disebabkan karena biaya honor PPKBD dan Sub PPKBD ditiadakan/dihapus karena revocusing anggaran.

Kami sangat berharap agar honor PPKBD dan Sub PPKB dapat kembali di tampung di anggaran Dinas PPKB untuk lebih meningkatkan semangat kerja para petugas agar pencapaian KB dapat berhasil seperti apa yang diharapkan

GRAFIK JUMLAH DAN PERSENTASE PEMBINAAN PUS KESERTAAN BER KB TAHUN 2023



JUMLAH DAN PERSENTASE PB WANITA TERHADAP PPM PB WANITA

Bulan Desember 2023

Lampiran 9

NO	KECAMATAN	PPM PB WANITA						PENCAPAIAN PB WANITA											%
		IUD	MOW	IMP	STK	PIL	JLH	IUD	%	MOW	%	IMP	%	STK	%	PIL	%	JLH	
1	Sibolga Kota	22	7	101	152	38	320	2	9.09	7	100.00	2	1.98	0	0.00	14	36.84	11	3.44
2	Sibolga Selatan	54	18	248	372	92	784	0	0.00	0	0.00	3	1.21	45	12.10	6	6.52	63	8.04
3	Sibolga Utara	31	10	146	219	54	460	2	6.45	0	0.00	4	2.74	4	1.83	8	14.81	22	4.78
4	Sibolga Sambas	30	10	141	211	53	445	0	0.00	0	0.00	4	2.84	10	4.74	0	0.00	27	6.07
KOTA SIBOLGA		137	45	636	954	237	2,009	4	2.92	7	15.56	13	2.04	59	6.18	28	11.81	123	6.12

JUMLAH DAN PERSENTASE KOMULATIF PB WANITA TERHADAP PPM PB WANITA

s.d Desember 2023

Lampiran 10

NO	KECAMATAN	PPM PB WANITA						PENCAPAIAN PB WANITA											%
		IUD	MOW	IMP	STK	PIL	JLH	IUD	%	MOW	%	IMP	%	STK	%	PIL	%	JLH	
1	Sibolga Kota	22	7	101	152	38	320	25	113.64	209	2,985.71	71	70.30	99	65.13	7	18.42	416	130.00
2	Sibolga Selatan	54	18	248	372	92	784	19	35.19	0	0.00	159	64.11	156	41.94	87	94.57	468	59.69
3	Sibolga Utara	31	10	146	219	54	460	14	45.16	0	0.00	72	49.32	55	25.11	65	120.37	255	55.43
4	Sibolga Sambas	30	10	141	211	53	445	9	30.00	0	0.00	94	66.67	82	38.86	91	171.70	348	78.20
KOTA SIBOLGA		137	45	636	954	237	2,009	67	48.91	209	464.44	396	62.26	392	41.09	250	105.49	1,487	74.02

JUMLAH DAN PERSENTASE PB PRIA TERHADAP PPM PB PRIA

Bulan Desember 2023

Lampiran 7

NO	KECAMATAN	PPM PB PRIA			PENCAPAIAN PB PRIA						JUMLAH	% PB PRIA TERHADAP PB
		MOP	KDM	JLH	MOP	%	KDM	%	JLH	%		
1	Sibolga Kota	6	16	22	0	0	0	0.00	0	0.00	11	0.00
2	Sibolga Selatan	16	40	56	0	0	1	2.50	1	1.79	63	1.59
3	Sibolga Utara	9	23	32	0	0	6	26.09	6	18.75	22	27.27
4	Sibolga Sambas	9	22	31	0	0	5	22.73	5	16.13	27	18.52
KOTA SIBOLGA		40	101	141	0	0	12	11.88	12	8.51	123	9.76

JUMLAH DAN PERSENTASE KOMULATIF PB PRIA TERHADAP PPM PB PRIA

s/d Bulan Desember 2023

Lampiran 8

NO	KECAMATAN	PPM PB PRIA			PENCAPAIAN PB PRIA						JUMLAH	% PB PRIA TERHADAP PB
		MOP	KDM	JLH	MOP	%	KDM	%	JLH	%		
1	Sibolga Kota	6	16	22	0	0	5	31.25	5	22.73	416	1.20
2	Sibolga Selatan	16	40	56	0	0	47	117.50	47	83.93	468	10.04
3	Sibolga Utara	9	23	32	0	0	49	213.04	49	153.13	255	19.22
4	Sibolga Sambas	9	22	31	0	0	72	327.27	72	232.26	348	20.69
KOTA SIBOLGA		40	101	141	0	0	173	171.29	173	122.70	1,487	11.63

Data Pengendalian LapanganTingkat Kota Sibolga

I. KEADAAN UMUM

NO	URAIAN	JUMLAH YANG ADA	JUMLAH LAPORAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kecamatan	4	4
2	PPLKB/Petugas KB Kecamatan	4	4
3	Desa/Kelurahan	17	17
4	PLKB/PKB/Petugas KB Desa	34	34
5	PPKBD	17	17
6	Sub PPKBD	61	61
7	Kelompok KB	124	124
8	Kelompok Kegiatan BKB	18	18
9	Kelompok Kegiatan BKR	17	17
10	Kelompok Kegiatan BKL	19	19
11	Kelompok Kegiatan UPPKS	19	19
12	Jumlah PIK-R/M	60	60

II. KEGIATAN OPERASIONAL

NO	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1	Frekwensi Operasional Mupen Kabupaten/Kota	0
2	Frekwensi Rakor Program KB tingkat Kecamatan	4
3	Frekwensi Rakor Program KB tingkat Desa/Kelurahan	17
4	Frekwensi Penyuluhan oleh PLKB/PKB	110
5	Frekwensi KIE dengan menggunakan KIE KIT	84
6	Jumlah Tokoh Masyarakat/Agama/Adat yang Aktif melakukan KIE KB	26
7	Frekwensi TKBK dari Kecamatan ke Desa/Kelurahan	18
8	Frekwensi Operasional Gerak MUYANG KB dari Kabupaten/Kota ke Kecamatan	0

III. PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA

NO	URAIAN	BKB	BKR	BKL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	4054	10.888	5171
2	Jumlah Keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan	573	676	636
3	Jumlah Keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan	553	423	485
4	Jumlah anggota kelompok kegiatan yang berstatus PUS	647	485	353
5	Jumlah anggota kelompok kegiatan yang berstatus PUS KPS dan KS I	450	352	268
6	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan yang menjadi peserta KB	549	407	279
7	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan yang menjadi peserta KB KPS dan KS I	377	291	214
8	Jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan	32	17	18
9	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB yang menggunakan KKA	670		

IV. PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA STATUS PUS DAN KESERTAAN BER-KB ANGGOTA KELOMPOK

NO	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1	Jumlah Keluarga yang menjadi anggota kelompok UPPKS :	
	a. Jumlah anggota kelompok UPPKS	211
	b. Jumlah anggota kelompok UPPKS KPS dan KS I	162
2	Status KB Anggota Kelompok UPPKS :	
	a. Anggota dari seluruh Tahapan KS	
	1) Jumlah anggota kelompok UPPKS yang berstatus PUS	166
	2) Jumlah anggota kelompok UPPKS yang berstatus ber KB	153
	b. Anggota dari Tahapan KPS dan KS I	
	1) Jumlah anggota kelompok UPPKS KPS dan KS I yang berstatus PUS	148
	2) Jumlah anggota kelompok UPPKS KPS dan KS I yang berstatus PUS ber KB	128
3	Jumlah Pertemuan Kelompok UPPKS	19

V. PEMBINAAN PUS DAN KESERTAAN BER-KB

NO	URAIAN	PUS DAN KESERTAAN KB MENURUT					
		JALUR PELAYANAN		TAHAPAN	JAMINAN KESEHATAN NASIONAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)			10422	6842	6834	3575
2	Jumlah Peserta KB Aktif :	5355	1258	6613	4469	4469	2144
	a. IUD (I)	693	143	836	576	578	258
	b. MOW (OW)	909	217	1126	703	701	425
	c. MOP (OP)	104	0	104	97	97	7
	d. KONDOM (K)	249	108	357	233	231	126
	e. IMPLAN (IP)	2027	6	2033	1467	1470	563
	f. SUNTIK (S)	925	679	1604	1033	1033	571
	g. PIL (P)	448	105	553	360	359	194
3	Jumlah Pasangan Usia Subur bukan Peserta KB :			3809	2373	2365	1431
	a. Hamil (H)			274	181	180	93
	b. Ingin Anak Segera (IAS)			1729	1124	1123	601
	c. Ingin Anak Ditunda (IAT)			771	461	459	307
	d. Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)			1035	607	603	430

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga akan terus berupaya untuk;

1. Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP). LPP berbanding lurus dengan kuantitas penduduk. LPP yang meningkat akan menyebabkan pemerintah menghadapi kesulitan dalam menyediakan kebutuhan dasar seperti ; sandang, pangan, papan, pekerjaan dan pendapatan. Pendapatan yang rendah akan menyebabkan bertambahnya pengangguran, kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh karena itu LPP harus dikendalikan. LPP dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, imigrasi. Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga adalah untuk pengendalian tingkat kelahiran.
2. Menurunkan angka TFR yang merupakan faktor dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan penduduk.

Sasarannya adalah untuk menurunkan angka kelahiran total. Penurunan TFR ini didukung dengan keberhasilan berupa :

1. Peningkatan PUS dalam Ber- KB
 2. Peningkatan usia perkawinan
 3. Pelayanan KB
3. Meningkatkan tingkat capaian pemakaian alat kontrasepsi
Usaha yang dilakukan adalah melakukan pelayanan, penyuluhan KB agar tingkat pemakaian Alat Kontrasepsi meningkat
 4. Meningkatkan Peserta KB Aktif menggunakan MKJP
Penggunaan ALKON merupakan upaya dalam pengendalian angka kelahiran dan menurunkan LPP. Dalam pelaksanaannya diusahakan agar semua pilihan ALKON ditawarkan kepada masyarakat dengan meminimalkan efek samping yang ditimbulkan.
 5. Menurunnya Unmet need (data dari persentase kebutuhan Ber-KB)
Kebutuhan Ber-KB tidak terpenuhi disebut persentase wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarakkan kelahiran berikutnya tetapi tidak memakai Alkon. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pelayanan dan penyuluhan.

6. Menurunkan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun/wanita hamil pada usia muda mempunyai risiko tinggi karena kondisi rahim dan pinggul belum berkembang. Sehingga dapat mengakibatkan resiko kematian bagi ibu dan anak. Upaya yang dilakukan mengadakan Penyuluhan/PIK KRR di seluruh sekolah dan perguruan tinggi di Kota Sibolga

Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga adalah sebagai berikut :

1. Jumlah data-data hasil pelayanan akseptor KB baru yang valid dan akuntabel

Indikator ini adalah untuk melihat transparansi data hasil pelayanan KB baru yang diperoleh di Kota Sibolga yang dilihat dari beberapa informasi.

2. Jumlah data-data per-mix kontrasepsi hasil capaian akseptor baru yang valid dan akuntabel

Indikator ini memberi gambaran tentang data hasil capaian permix-kontrasepsi yang ada di Kota Sibolga.

3. Jumlah data-data akseptor KB aktif dengan penggunaan alkon permix-kontrasepsi yang valid dan akuntabel

Indikator ini adalah untuk melihat transparansi data hasil pelayanan peserta KB aktif yang diperoleh di Kota Sibolga yang dilihat dari beberapa informasi

4. Jumlah data-data hasil capaian pelayanan akseptor KB aktif yang valid dan akuntabel

Indikator ini adalah untuk melihat transparansi data hasil pelayanan peserta KB aktif per-kecamatan per-mix kontrasepsi yang diperoleh di Kota Sibolga yang dilihat dari beberapa informasi

5. Jumlah data-data hasil capaian setiap bulannya sesuai dengan klasifikasi yang valid dan akuntabel

Indikator ini adalah untuk melihat transparansi data hasil capaian setiap bulannya sesuai dengan klasifikasi di Kota Sibolga secara benar.

6. Jumlah dokumen data-data hasil capaian keseluruhan dengan klasifikasi yang valid dan akuntabel.

Indikator ini adalah dokumen untuk melihat transparansi hasil capaian keseluruhan di Kota Sibolga secara benar dan dapat memberi gambaran tentang perencanaan tahunan pemerintah Kota Sibolga.

7. Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota

Indikator ini menggambarkan sinergitas pelaksanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Dalam penyusunan LKjIP ini, tingkat keberhasilan pencapaian sasaran diukur dengan mempergunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Nilai Angka	Kategori
>85 s/d 100	Memuaskan
>75 s/d 85	Sangat Baik
>65 s/d 75	Baik
>50 s/d 65	Cukup Baik
>30 s/d 50	Agak Kurang
0 s/d 30	Kurang

Evaluasi kinerja sasaran adalah merupakan hasil dari setiap nilai capaian kinerja sasaran kemudian diberikan pembobotan untuk memperoleh nilai capaian sasaran. Pengukuran pencapaian sasaran dari program-program yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Tercapainya Peserta KB Baru sesuai dengan PPM	1. Jumlah rata-rata capaian akseptor baru	1. 2.009 Akseptor Baru	1. 1.487 Akseptor Baru	74.02 %
	2. Jumlah data-data capaian akseptor baru per Kecamatan	2. 4 Kecamatan	2. 4 Kecamatan	100 %
Meningkatnya peserta KB Aktif sesuai dengan PPM	1. Jumlah akseptor aktif dengan penggunaan alkon per mix kontrasepsi	1. 10.342 peserta KB Aktif sesuai mix-kontrasepsi	6.279 peserta KB Aktif sesuai mix-kontrasepsi	60.71%

	2. Jumlah data-data capaian akseptor aktif di kecamatan permix kontrasepsi	2. Data-data CU per-mix Kontrasepsi 4 Kcmtn	2. Data-data CU per-mix Kontrasepsi 4 Kecamatan	100 %
Tertatanya data potensial unggulan yang baik dan sesuai dengan klasifikasi	1. Tersedianya data capaian setiap bulan nya sesuai dgn klasifikasi	1. 12 bulan tersedianya data	1. 12 bulan tersedianya data	100 %
	2. Jumlah dokumen hasil capaian yang tersedia	2. 12 buku umpan balik	2. 12 buku umpan balik	100 %
	3. Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan dr pemerintah pusat, pemerintah prov & pemerintah kota	3. 1 kali ke Provinsi	3. 1 kali ke Provinsi	100 %

Nilai capaian berdasarkan hasil evaluasi sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO.	SASARAN	SKALA PENGUKURAN						KET
		M	SB	B	CB	AK	K	
1	Tercapainya Peserta KB Baru sesuai dengan PPM	✓	-	-	-	-	-	
2	Meningkatnya peserta KB Aktif sesuai dengan PPM	✓	-	-	-	-	-	
3	Tertatanya data potensial unggulan yang baik dan sesuai dengan klasifikasi	✓	-	-	-	-	-	

Keterangan :

M = Memuaskan

SB = Sangat Baik

B = Baik

CB = Cukup Baik

AK = Agak Kurang

K = Kurang

Berdasarkan tabel evaluasi kinerja sasaran sebagaimana tersebut diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga berhasil dalam pencapaian kinerja. Keberhasilan ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan lagipada tahun-tahun mendatang.

Pencapaian peserta KB baru Tahun 2023 adalah 1.487 (74.02% dari PPM 2.009) dan pencapaian peserta KB aktif yang capaiannya sebanyak 6.279 dari target 10.342 akseptor aktif, pencapaian rata-rata usia perkawinan 21-23 tahun. Disamping hal tersebut kegiatan lainnya yaitu penyuluhan KIE Narkoba, KIE HIV/AIDS, KIE KRR di sekolah-sekolah menengah dan perguruan tinggi di Kota Sibolga.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga , setelah dilakukan pengukuran kinerja dapat dijabarkan hasil evaluasi capaian sasaran pada tahun anggaran 2023, sebagai berikut :

1. Terlaksananya Pelayanan Keluarga Berencana

No	Jumlah PPM	Capaian	Realisasi
1.	2.009	1.487	74.02%
No	Jumlah PPM	Capaian	Realisasi
1.	2.009	1.487	74.02%

Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran (PPS) Tahun 2023 untuk sasaran satu yaitu tercapainya keikutsertaan masyarakat/PUS menjadi peserta KB baru dengan indikator sasaran tingkat akurasi data , dimana tingkat capaian 100 % terealisasi 74.02% yang berarti persentase tingkat capaian terealisasi 74.02% dan keikutsertaan masyarakat/PUS menjadi peserta Aktif dengan indikator sasaran tingkat akurasi data, dimana tingkat capaian 100 % terealisasi 74.02% yang berarti tingkat capaian terealisasi 74.02% Sasaran ini dicapai melalui kegiatan-kegiatan pelayanan dan pembinaan terpadu seperti Pelayanan pemasangan kontrasepsi, serta melalui pertemuan-pertemuan kelompok seperti BKB, Kelompok UPPKS serta PPKBD dan Sub PPKBD.

2. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Reproduksi

No	Jumlah Kelompok PIK - R	Capaian	Realisasi
1	61 Kelompok	61 Kelompok	100%

Pada sasaran ini menempatkan persentase tingkat pelayanan dan penyuluhan sebagai indikator sasaran, dimana untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar 61 kelompok, telah dapat terealisasi sebesar 61 kelompok, yang berarti persentase tingkat capaian telah terealisasi 100 %.

Dalam pencapaian sasaran ini telah ditetapkan 3 (tiga) program dan 3 (tiga) kegiatan yang terdiri dari : Melaksanakan penyuluhan reproduksi sehat kepada para remaja di sekolah-sekolah menengah atas se-Kota Sibolga. Melaksanakan penyuluhan Kesehatan Reproduksi Sehat di Lingkungan Saka Kencana Binaan PP dan KB Kota Sibolga. Melaksanakan pengembangan, Pengelolaan, dan Pelayanan PK-Remaja dan PKBR

3. Terwujudnya Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB

Pada sasaran ini menempatkan persentase tingkat pembinaan sebagai indikator sasaran, dimana untuk tahun 2023 pencapaian pembinaan institusi masyarakat dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Institusi Masyarakat (kader)	Jumlah	Kategori		
		Dasar	Berkembang	Mandiri
PPKBD	17	-	17	-
Sub PPKBD	64	-	64	-
UPPKS	21	10	11	-

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi serta dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga, dana yang dialokasikan melalui APBD Kota Sibolga TA. 2023 berjumlah sebesar Rp. 10.722.091.046,- dengan perincian berikut:

NAMA PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
BELANJA DAERAH	10.722.091.046	9.274.360.001	86.49%	
BELANJA OPERASI	8.710.282.236	7.354.489.801	84.43%	
Belanja Pegawai	3.109.638.774	2.761.856.018	88.81%	
Belanja Barang Dan Jasa	5.600.643.462	4.592.633.783	82.00%	
BELANJA MODAL	2.011.808.810	1.919.870.200	95.43%	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	519.337.000	437.645.000	84.26%	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.492.471.810	1.482.225.200	99.31%	
Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.068.538.774	2.728.756.018	88.92%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.068.538.774	2.720.756.018	88.66%	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	36.000.000	36.000.000	100%	
- Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	36.000.000	36.000.000	100%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.100.000	5.100.000	100%	
- Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	5.100.000	5.100.000	100%	

NAMA PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.037.768.736	1.511.843.031	74.19%	
Penyediaan - Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	15.988.000	14.611.300	91.38%	
Penyediaan Peralatan - dan Perlengkapan kantor	85.765.100	82.529.600	96.22%	
Penyediaan Peralatan - Rumah Tangga	5.032.200	5.025.600	99.86%	
Penyediaan Barang - Cetakan dan Penggandaan	17.302.600	14.919.700	86.22%	
Fasilitas Kunjungan - Tamu	9.989.886	5.904.500	59.10%	
Penyelenggaraan - Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	550.193.000	208.763.893	37.94%	
Pengadaan Peralatan - dan Mesin Lainnya	8.400	-	-	
Penyediaan Jasa - Surat Menyurat	4.987.500	3.120.000	62.55%	
Penyediaan Jasa - Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.179.300	83.207.395	76.21%	
Penyediaan jasa - Pelayanan Umum Kantor	888.600.000	858.080.000	96.56%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Mebel	309.622.750	199.426.043	64.40%	
7.000.000	6.948.000	99.25%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Lainnya	34.100.000	29.307.000	85.94%	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	28.200.000	27.655.900	98.07%	
Pencatatan dan - Pengumpulan Data Keluarga	9.600.000	4.800.000	50%	

NAMA PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
Pengolahan dan Pelaporan Data - Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	28.238.400	11.521.800	40.80%	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.470.519.920	1.207.481.367	82.11%	
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) - Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	-	
Promosi KIE Program KKBPK melalui media - massa cetak dan elektronik serta media luar ruangan	149.999.800	111.426.050	74.28%	
Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat - koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi kecamatan desa (Rakordes) dan Minilok	171.974.490	150.831.950	87.70%	
Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK -	189.634.139	154.854.686	81.65%	
Pengendalian Program KKBPK -	79.999.676	77.977.800	97.47%	
Penggerakan Kader - Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	180.400.500	168.187.000	93.22%	
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana - Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	8.991.176	4.772.800	53.08%	
Peningkatan Kesertaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) -	485.670.579	369.455.236	76.07%	
Penyediaan Sarana - Penunjang Pelayanan KB	8.065.000	6.438.400	79.83%	
Pembinaan Pasca Pelayanan bagi -	98.017.200	90.403.845	92.23%	

NAMA PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
Peserta KB				
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan - Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	8.690.460	6.520.000	75.02%	
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	89.076.900	66.613.600	74.78%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.026.316.406	1.829.331.685	90.27%	
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	805.512.280	764.665.000	94.92%	
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	550.938.916	490.992.335	89.11%	
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	174.966.000	160.800.000	91.90%	
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan	494.899.210	412.874.350	83.42%	

NAMA PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	79.337.000	-	-	
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	29.153.900	-	-	
- Pengadaan Peralatan dan ,Mesin Lainnya	50.183.100	-	-	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	440.000.000	437.645.000	99.46%	
- Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	440.000.000	437.645.000	99.46%	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.492.471.810	1.482.225.200	91.64%	
- Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.492.471.810	1.482.225.200	91.64%	

REKAPITULASI BUKU INVENTARIS
01 JULI 2020 s/d 31 DESEMBER 2020

SKPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 KAB/KOTA : SIBOLGA
 PROPINSI : SUMATERA UTARA

NO.	GOL.	KODE BID. BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JLH. BRG. (UNIT)	JLH. HARGA (Rp.)	K e t
1	2	3	4	5	6	7
1	01	01	TANAH	-	-	-
2	02		PERALATAN DAN MESIN	40	1,010,999,850	-
		01	a. Alat Besar	-	-	-
		02	b. Alat Angkutan	1	694,650,000	-
		03	c. Alat Bengkel & alat ukur	-	-	-
		04	d. Alat Pertanian	-	-	-
		05	e. Alat kantor & rumah tangga	14	104,092,400	-
		06	f. Alat studio, komunikasi dan Pemancar	-	-	-
		07	g. Alat kedokteran	-	-	-
		08	h. Alat laboratorium	-	-	-
		09	i. Alat Persenjataan	-	-	-
		10	j. Komputer	25	212,257,450	-
		11	k. Alat Eksplorasi	-	-	-
		12	l. Alat Pengeboran	-	-	-
		13	m. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	-	-	-
		14	n. Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-
		15	o. Alat Keselamatan Kerja	-	-	-
		16	p. Alat Peraga	-	-	-
		17	q. Peralatan Proses/Produksi	-	-	-
		18	r. Rambu-rambu	-	-	-
		19	s. Peralatan olahraga	-	-	-
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	-	-	-
		01	a. Bangunan Gedung	-	-	-
		02	b. Monumen	-	-	-
		03	c. Bangunan	-	-	-

4	04	04	Menara	-		
			d. Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	-
			JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	-	-	-
		01	a. Jalan & Jembatan	-	-	-
5	05	02	b. Bangunan Air/Irigasi	-	-	-
		03	c. Instalasi	-	-	-
		04	d. Jaringan	-	-	-
			ASET TETAP LAINNYA	-	-	-
		01	a. Bahan Perpustakaan	-	-	-
		02	b. Barang bercorak Keseniaan/Kebudayaan/Olahraga	-	-	-
		03	c. Hewan	-	-	-
		04	d. Biota Perairan	-	-	-
		05	e. Tanaman	-	-	-
		06	f. Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-
		07	g. Aset Tetap dalam Renovasi	-	-	-
6	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	-
7	07		AKUMULASI PENYUSUTAN	-	-	-
		01	a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	-
		02	b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
		03	c. Akumulasi Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi	-	-	-
		04	d. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
8	08		ASET LAINNYA	-	-	-
			Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-

		01	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-
			Aset Tidak Berwujud	-	-	-
		01	Aset Tak Berwujud	-	-	-
			Aset Lain - lain	-	-	-
		01	Aset Lain - lain	-	-	-
			JUMLAH	40	1,010,999,850.-	-

D.CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 LAKIP

Tujuan 1: Terwujudnya capaian peserta KB baru secara transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
	TARGET (PPM)	CAPAIAN (PPM)
1. Tercapainya peserta KB baru sesuai dengan prakiraan permintaan masyarakat	- 2.009 Akseptor Baru	- 1.487 akseptor baru
	- 4 Kecamatan	- 4 Kecamatan

Tujuan 2 : Meningkatnya peserta KB aktif yang efisien dan efektif pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
	TARGET (PPM)	CAPAIAN (PPM)
1. Meningkatkan peserta KB aktif sesuai dengan prakiraan permintaan masyarakat	- 10.342 peserta KB Aktif sesuai mix-kontrasepsi	- 6.279 peserta KB Aktif sesuai mix-kontrasepsi
	- Data-data CU per-mix Kontrasepsi 4 Kecamatan	- Data-data CU per-mix kontrasepsi di 4 Kecamatan

Tujuan 3 : Terselenggaranya perencanaan umum dan perencanaan tahunan daerah sesuai dengan rencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
	TARGET	CAPAIAN
1. Tertatanya data potensial unggulan yang baik dan sesuai dengan dengan klasifikasi.	- 12 bulan tersedianya data - 12 buku umpan balik	- 12 bulan tersedianya data - 12 buku umpan balik

Dari hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan, bahwa capaian indikator kinerja utama adalah nilai 100. pada sasaran terlaksananya pelayanan peserta KB Aktif. Namun secara keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan pada unit kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga dapat berjalan dengan baik, hal ini digambarkan dengan perolehan capaian kinerjanya rata-rata 100 %. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja sasaran memiliki nilai rata-rata 100 % hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja sasaran memiliki nilai **MEMUASKAN**.

E. KENDALA DAN SOLUSI

Permasalahan/Kendala :

Perpindahan penduduk yang tinggi dan persebaran penduduk yang tidak merata mengakibatkan petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sulit untuk memantau Pasangan Usia Subur (PUS) , peserta KB Aktif (PA) yang aktif menggunakan Alat Kontrasepsi (Alkon) agar tidak putus dalam pemakaian ALKON;

1. Sulitnya menggarap akseptor yang menggunakan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sehingga petugas KB harus aktif membina PUS yang bukan pengguna MKJP (Suntik,Pil dan Kondom);
2. Target dari pusat yang mengharuskan setiap daerah harus membentuk sekolah siaga kependudukan dari Tingkat SMP dan Tingkat SMA
3. Minimnya anggaran sehingga meniadakan kegiatan Genre sehingga pembinaan Remaja melalui PK KRR terkendala
4. Kader KB (PPKBD,SubPPKBD dan BKB) adalah tenaga bantu dari masyarakat yang diberdayakan Pemerintah untuk membantu tugas-tugas yang berhubungan dengan masyarakat terutama dalam hal Keluarga Berencana (KB) dengan merebaknya kasus Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pengurangan anggaran sehingga dihapusnya bantuan honor bagi kader PPKBD,Sub PPKBD,BKB maka kader tidak mau lagi bekerja sama untuk membantu tugas-tugas KB;
5. Program PKH dan Program bantuan lainnya dari Pemerintah yang menghambat Program KB , sehingga masyarakat beranggapan semua dibantu Pemerintah;
6. Minimnya Anggaran sehingga terbatasnya melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pelayanan KB dilapangan dan tidak mampu untuk mengikuti kegiatan di luar daerah terutama untuk mengikuti lomba yang diselenggarakan BKKBN tingkat provinsi dan tingkat Nasional;

Tantangan :

- Subsidi/bantuan dari Pemerintah
- Suami sebagai penentu keputusan menyulitkan untuk melakukan pelayanan KB kepada Akseptor
- Kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti program KB terutama yang metode MKJP.
- Sulitnya mengaktifkan poktan-poktan

Peluang :

- Adanya dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Bidang KB
- Mudahnya masyarakat memperoleh informasi tentang KB
- Adanya kerjasama dengan TNI Manunggal KB Kesehatan
- Adanya kerjasama yang baik dengan pihak Kecamatan, Kelurahan, dan Klinik KB Swasta

Kelemahan :

- Belum optimalnya anggaran
- Masih rendahnya SDM masyarakat tentang KB

BAB IV

P E N U T U P

Pencapaian sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga pada tahun 2023 baik. Keberhasilan ini adalah berkat dukungan, keseriusan dan kerja sama yang baik dari seluruh pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga telah berupaya dan berbuat secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Namun karena keterbatasan faktor-faktor yang dimiliki, seperti keuangan, SDM dan fasilitas lain, sehingga masih banyak kekurangan-kekurangan yang memerlukan perhatian dan pembenahan pada tahun – tahun mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga adalah merupakan salah satu media akuntabilitas, yang menyajikan informasi – informasi pengelolaan kegiatan atau program yang dilaksanakan yang digunakan sebagai umpan balik dalam hal pengambilan keputusan. Dalam LKjIP ini disajikan tujuan, sasaran strategi dan indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran dan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga.

Terhadap masalah-masalah maupun hambatan – hambatan yang dihadapi dalam hal kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran, dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perubahan atau perbaikan pada tahun berikutnya.

Sibolga, Januari 2024
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Sibolga

Richard Mangatur Pangaribuan, S.Si, Apt, M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP : 19681113 200212 1 001

